

Ekonomi NTT 2024 Tumbuh 3,73 Persen, PDRB Capai Rp137,28 Triliun



Kupang, nwartapedia.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Kepala BPS NTT, Matamira B. Kale, S.Si., M.Si., resmi merilis kinerja perekonomian NTT pada tahun 2024.

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ekonomi NTT menunjukkan capaian signifikan dengan total PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp137,28 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp78,04 triliun.

“Pertumbuhan ini menunjukkan arah perkembangan positif di berbagai sektor, khususnya sektor-sektor strategis yang berperan besar dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi,” jelas Matamira dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor BPS NTT pada Rabu (05/01/2025).

Disampaikan bahwa, sepanjang tahun 2024, perekonomian NTT tumbuh sebesar 3,73 persen (c-to-c). Dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi penggerak utama dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 11,95 persen.

“Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terbesar terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang meningkat sebesar 11,29 persen,”ungkapnya.

Matamira menyampaikan, pada triwulan IV-2024, ekonomi NTT mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,03 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (*y-on-y*).

“Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum kembali menjadi motor penggerak utama dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 13,28 persen. Dari sisi pengeluaran, PK-LNPRT tumbuh signifikan sebesar 6,25 persen,”ujarnya..

Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (*q-to-q*), ekonomi NTT pada triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen.

“Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi tercatat pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang melesat hingga 15,40 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mencatatkan pertumbuhan luar biasa sebesar 36,63 persen,”ujarnya..

Menurutnya, pada tahun 2024, struktur perekonomian NTT masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi mencapai 28,87 persen.

“Dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tetap menjadi penyumbang utama sebesar 66,70 persen,”ujar Matamira.

Matamira menambahkan, sektor pertanian tetap menjadi fondasi ekonomi NTT. Namun, pertumbuhan signifikan di sektor akomodasi dan makan minum mencerminkan potensi besar pariwisata dan industri pendukungnya.

“Ini momentum penting bagi NTT untuk mendorong diversifikasi

ekonomi dan memperkuat daya saing sektor unggulan lainnya,” ungkapnya.

Dengan capaian ini, BPS optimis pertumbuhan ekonomi NTT akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang, didukung sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk memaksimalkan potensi lokal. (MI)

Korem 161/Wira Sakti Peringati Isra Mi'raj Bersama Prajurit, PNS, dan Persit KCK



Kupang, nwartapedia.com – Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Korem 161/Wira Sakti menggelar acara bersama prajurit, PNS, dan Persit KCK Koordcab Rem 161 PD IX/Udayana di Masjid Nurul Whathan Kuanino, Kota Kupang. Acara ini mengusung tema “Membangun Mentalitas Tangguh Menghadapi Percepatan Zaman”, yang bertujuan untuk memperkuat keimanan serta mentalitas prajurit dan keluarga besar Korem 161/WS di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Komandan Korem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes, S.E., M.M dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kasrem 161/WS Kolonel Inf Riko Haryanto, S.I.P menegaskan bahwa peringatan Isra Mi'raj bukan hanya seremonial semata, tetapi momentum refleksi diri untuk meningkatkan kualitas keimanan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari.

"Isra Mi'raj merupakan peristiwa luar biasa yang mengajarkan keteguhan hati dalam menghadapi ujian. Kita harus merenungi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk memperbaiki sikap, perilaku, dan pengabdian kita, baik dalam tugas sebagai prajurit maupun dalam kehidupan bermasyarakat," ujar Danrem dalam sambutannya.

Dalam kesempatan ini, Ustad Sofyan Abdurrahman, S.Ag. memberikan tausiah mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara keimanan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman.

"Isra Mi'raj adalah simbol ketangguhan spiritual dan mental. Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai cobaan, tetapi tetap teguh dalam keimanannya. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam menghadapi percepatan zaman, iman dan ketakwaan harus menjadi pegangan utama," jelas Ustad Sofyan.

Ia juga mengingatkan agar prajurit dan keluarga besar Korem 161/Wira Sakti tidak mudah terpengaruh oleh dampak negatif teknologi, seperti berita hoaks, informasi menyesatkan, dan pergaulan yang menyimpang.

"Gunakan teknologi sebagai alat untuk memperkuat diri, menambah ilmu, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama," tambahnya.

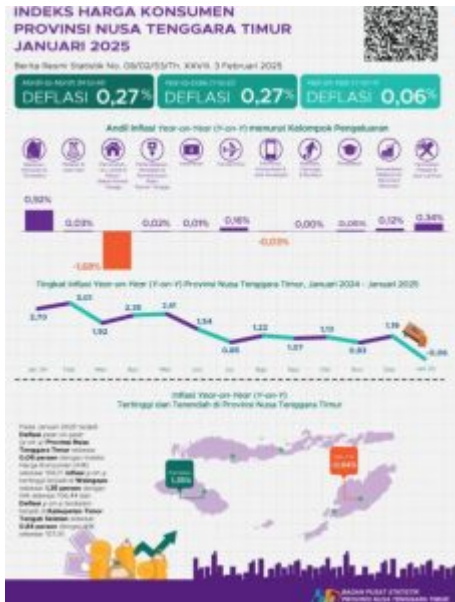
Acara peringatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Korem 161/Wira Sakti, di antaranya Kasrem 161/Wira Sakti, Kasi Pers Kasrem 161/Wira Sakti, Kabalak Aju Kodam IX/Udayana, Wakil Ketua Persit KCK Koarcab Rem 161 PD IX/Udayana, Para perwira, bintara, tamtama, serta PNS Korem 161/Wira Sakti.

Selain di Korem 161/Wira Sakti, peringatan Isra Mi'raj juga diselenggarakan oleh satuan jajaran Korem 161/Wira Sakti di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur.

Dengan semangat Isra Mi'raj, diharapkan seluruh prajurit, PNS, dan keluarga besar Korem 161/Wira Sakti dapat semakin kuat secara mental, disiplin dalam tugas, dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keimanan dan kebangsaan.

(Penrem 161/Wira Sakti)

**NTT Alami Deflasi 0,06 Persen
pada Januari 2025, Waingapu
Catat Inflasi Tertinggi**



Kupang, nwartapedia.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan bahwa pada Januari 2025, wilayah NTT mengalami deflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 0,06 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,11.

Penurunan harga ini terutama disebabkan oleh turunnya tarif pada kelompok perumahan serta informasi dan komunikasi.

Meski secara keseluruhan terjadi deflasi, perbedaan tren inflasi di beberapa daerah cukup mencolok. Waingapu mencatat inflasi tertinggi sebesar 1,35 persen dengan IHK mencapai 106,44, sementara deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebesar 0,84 persen dengan IHK 107,91.

Menurut Kepala BPS NTT, Mataram M. Kale, deflasi pada Januari 2025 disebabkan oleh penurunan harga pada dua kelompok pengeluaran utama, yaitu Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, turun 9,16 persen.

“Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, turun 0,49 persen,”ungkapnya dalam siaran resmi BPS NTT pada Senin (03/01/2025).

Namun, beberapa kelompok pengeluaran mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, di antaranya Kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik 2,45 persen, Kelompok pakaian dan alas kaki

naik 0,66 persen, Kelompok transportasi naik 1,19 persen, Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik 2,53 persen, Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik 5,95 persen.

Meskipun inflasi terjadi di beberapa sektor, menurut Maramira, penurunan harga pada kelompok perumahan dan komunikasi cukup besar sehingga secara keseluruhan NTT mengalami deflasi.

Matamira menjelaskan, selain deflasi tahunan (y-on-y), NTT juga mengalami deflasi month-to-month (m-to-m) dan year-to-date (y-to-d) sebesar 0,27 persen dibandingkan Desember 2024.

Ini menandakan bahwa harga barang dan jasa pada Januari 2025 lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

Menurut BPS, angka ini menunjukkan adanya penyesuaian harga di berbagai sektor, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor musiman serta kebijakan harga energi dan bahan pokok di tingkat nasional dan daerah.

Dengan kondisi ini, BPS akan terus memantau dinamika inflasi dan deflasi di NTT untuk memastikan keseimbangan harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga. (MI)

**NTP NTT Januari 2025 Naik
0,63 Persen, Inflasi
Perdesaan Tercatat 0,01
Persen**



Kupang, nwartapedia.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Mataram B. Kale, S.Si., M.Si menyampaikan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) NTT pada Januari 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,63 persen dibandingkan dengan Desember 2024.

Menurut Matamira, NTP Januari 2025 dihitung berdasarkan tahun dasar 2018 (2018=100) dan mencakup lima subsektor utama, yaitu tanaman padi dan palawija, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, serta perikanan.

Secara keseluruhan, NTP NTT pada Januari 2025 tercatat sebesar **101,60**, dengan rincian sebagai berikut **Tanaman padi-palawija (NTP-P): 99,81**, **Hortikultura (NTP-H): 98,55**, **Tanaman perkebunan rakyat (NTP-TPR): 104,54**, **Peternakan (NTP-Pt): 107,89** dan **Perikanan (NTP-Pi): 93,44**.

“Kenaikan NTP ini disebabkan oleh perkembangan indeks harga terima yang lebih cepat dibandingkan harga bayar. Hampir semua subsektor mengalami peningkatan, kecuali subsektor peternakan,” ujar Matamira dalam siaran resmi BPS NTT pada Senin (03/01/2025)).

Selain itu, BPS juga mencatat bahwa pada Januari 2025 terjadi inflasi perdesaan sebesar **0,01 persen**.

Inflasi ini terutama dipicu oleh kenaikan harga pada subkelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Dengan kenaikan NTP ini, diharapkan daya beli dan kesejahteraan petani di NTT dapat terus meningkat, meskipun masih ada tantangan dalam subsektor tertentu seperti perikanan dan hortikultura yang mencatat angka di bawah 100, menandakan bahwa biaya produksi masih lebih tinggi dibandingkan harga jual.

BPS akan terus memantau perkembangan ekonomi perdesaan dan sektor pertanian di NTT untuk memberikan data yang akurat dalam pengambilan kebijakan yang berpihak pada petani. (MI)

BPBD NTT Bersinergi dengan BMKG dalam Pengendalian Bencana di Wilayah Rawan



Kupang, nwartapedia.com – Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara

Timur (NTT), **Ir. Cornelis Wadu, M.Si.**, menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan **BMKG** dalam mengendalikan dan mengantisipasi berbagai bencana di wilayah yang rawan, termasuk di Lsiana dan beberapa daerah di kabupaten lainnya.

Cornelis Wadu menyampaikan bahwa data dari BMKG menjadi dasar bagi BPBD untuk segera menginformasikan kepada pemerintah kabupaten/kota agar dapat mengambil langkah antisipatif terhadap potensi bencana, seperti gempa bumi, banjir, dan cuaca ekstrem.

“Kami selalu berkoordinasi dengan BMKG untuk menyampaikan informasi terkini kepada kabupaten/kota, sehingga mereka dapat segera melakukan langkah-langkah antisipasi. Wilayah timur NTT, termasuk daerah Rawon Wongsor, menjadi salah satu titik yang perlu perhatian khusus karena potensi bencana gempa dan banjir,” ujar Cornelis Wadu saat konferensi pers yang berlangsung di Kantor Gubernur pada Kamis (30/01/2025).

Selain itu, BPBD juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan perguruan tinggi, dalam upaya mitigasi bencana. Dalam beberapa kejadian terakhir, dampak bencana di NTT masih dapat dikendalikan.

Hingga saat ini, meskipun kondisi cuaca cukup ekstrem, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

“Kami bersyukur bahwa hingga saat ini tidak ada korban jiwa akibat bencana. Namun, kami tetap mempersiapkan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak. BPBD juga terus menyampaikan berbagai informasi sebagai panduan bagi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana,” tambahnya.

Cornelis Wadu menegaskan bahwa BPBD NTT akan terus meningkatkan kesiapsiagaan dan sinergi dengan berbagai pihak guna memastikan keselamatan masyarakat di wilayah rawan bencana. (MI)

MUI Kota Kupang Resmi Cabut Larangan, Pemkot Pastikan Daging RPH Bimoku Halal



Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang memastikan daging yang dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) Bimoku halal dan memenuhi syariat Islam.

Kepastian ini diberikan setelah Pemkot Kupang menindaklanjuti surat edaran larangan konsumsi daging dari RPH Bimoku yang sebelumnya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Kupang.

Sebagai langkah nyata, Pemkot Kupang menambah dua juru sembelih halal (Juleha) di RPH Bimoku untuk memastikan seluruh tahapan penyembelihan sesuai standar kesehatan dan syariat Islam.

Langkah ini mendapat apresiasi dari MUI Kota Kupang, yang langsung mencabut larangan tersebut pada Minggu (19/1) dini hari.

Pencabutan larangan ditandai dengan pemotongan hewan di RPH

Bimoku oleh Ketua MUI Kota Kupang, H. Muhammad MS. Acara ini juga dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Kupang Linus Lusi, S.Pd., M.Pd., sejumlah anggota DPRD Kota Kupang, pengurus MUI, serta para pengusaha pemilik hewan.

Respons Cepat Pemkot Kupang

Penjabat Wali Kota Kupang Linus Lusi mengucapkan terima kasih kepada MUI Kota Kupang atas koordinasi yang baik sehingga masalah ini dapat segera diselesaikan.

Menurutnya, langkah ini penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Kota Kupang sebagai konsumen sekaligus mencegah kerugian bagi pelaku usaha.

“Harapan kami, pelayanan di RPH Bimoku dapat berjalan lebih baik, sesuai prosedur keagamaan, dan distribusi daging ke pasar lebih cepat,” ujar Linus.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Kupang melalui dinas teknis berkomitmen untuk terus membenahi aspek yang belum optimal di RPH Bimoku.

MUI Pastikan Kehalalan Daging

Ketua MUI Kota Kupang, H. Muhammad MS, secara resmi mengumumkan pencabutan surat edaran larangan konsumsi daging dari RPH Bimoku.

Ia menjelaskan bahwa larangan sebelumnya dikeluarkan karena adanya keraguan dari umat Muslim terhadap kehalalan daging yang dipotong di RPH Bimoku.

Namun, setelah melihat upaya serius Pemkot Kupang, H. Muhammad memastikan bahwa daging di RPH Bimoku kini halal dan tidak perlu diragukan lagi.

“Mulai saat ini, surat larangan tersebut secara resmi kami cabut. Daging yang dipotong di RPH Bimoku sudah terjamin kehalalannya,” tegas H. Muhammad.

Dengan pencabutan larangan ini, Pemkot Kupang dan MUI berharap

distribusi daging halal di Kota Kupang dapat berjalan lancar, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menghilangkan keraguan yang sempat muncul. ***

Bela Kebenaran, Yen Oni Berikan Pesan



Kupang, nwartapedia.com – Kebenaran adalah keadaan yang sesuai dengan kenyataan, atau persesuaian antara pengetahuan, penalaran, dan objek.

Dengan senyum, Yen oni siap terima panggilan dari polda NTT terkait laporan Rudi Soik (RS). Selasa 7/1/24.

Menurut yen oni, laporan saudara RS salah kaprah Semestinya laporan tersebut dialamatkan kepada Aliansi Peduli Kemanusiaan, bukan terhadap perseorangan.

“Mengingat segala apapun reaksi dan orasi yang tercipta dalam

aksi kami adalah oleh dan atas nama Aliansi Peduli Kemanusiaan". Ungkapnya.

"Aksi kami bukan aksi liar, kami punya ijin dari Kepolisian sehingga segala orasi kami dijamin dan dilindungi hukum tetapi bagaimanapun itu sebagai Warga Negara Indonesia yang sadar hukum saya akan tetap kooperatif menghadapi ini". Jelasnya.

Apa yang disampaikan di muka publik adalah bagian dari memberikan pendapat dan ketidakpuasan atas memberikan pendapat.

Hak memberikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Hak ini diartikan sebagai hak untuk mengemukakan pendapat atau pemikiran secara bebas tanpa takut akan pembatasan atau hukuman dari pihak lain.

"Tidak ada kebimbangan atau kecemasan sedikitpun, saya justru melihat ini sebagai momentum istimewa dimana kebenaran itu diberi jalan dan ruang untuk memperlihatkan keberadaannya". Tegas Oni.

Yang berikut saya melihat hal ini juga merupakan pembuktian bahwa aksi kami, Tambah oni, (Aliansi Peduli Kemanusiaan) bukanlah aksi orderan POLDA NTT. Ini jelas mematahkan anggapan segelintir orang bahwa saya/kami adalah massa bayaran POLDA NTT.

"SEYAKIN APAKAH ANDA BISA MEMPERTANGGUNG JAWABKAN ORASI ANDA YANG MENYINGGUNG NAMA SAUDARA RUDY SOIK" Tegasnya.

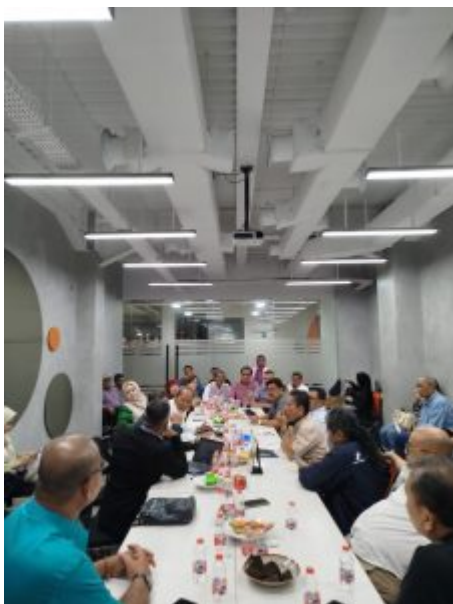
"Saya sangat yakin dan optimis, se'optimis suara teriakan saya! Dan semoga saya bisa menjadi contoh untuk kemudian diikuti oleh milenial Jangan diam saja ketika melihat fenomena ketidak benarJan Jangan jadi penonJang Jangan pernah takut terhadap resiko apapun jika Anda tau yang benar Lantangkan suaramu, bersuaralah". Tegas Oni.

Masyarakat membutuhkan Anda untuk mendapatkan keadilan, Semua orang juga pasti akan mati, tapi saya ingin pastikan bahwa saya tidak mati sia-sia!

Setidaknya saya menebar benih-benih keberanian kepada masyarakat agar tidak takut bersuara.

“saya berharap perjuangan Aliansi Peduli Kemanusiaan NTT ini menjadi perhatian dan atensi KAPOLRI bahkan Presiden RI Bapak Jenderal TNI Purn. Prabowo Subianto, Setidaknya buatlah kami percaya bahwa keadilan itu masih ada. Saya rasa itu.....”
tutupnya. (MN)

HPN 2025 Siap Digelar di Banjarmasin, Ketum PWI Pusat Minta Persiapan Teknis Dimulai Pekan Depan



Jakarta, nwartapedia.com – Persiapan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 terus dipercepat setelah mendapat dukungan penuh dari Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, meminta Panitia Pelaksana (Panpel) HPN 2025 segera bergerak melakukan persiapan teknis di lapangan mulai pekan depan. HPN 2025 dijadwalkan berlangsung di Banjarmasin, Kalsel.

“Mulai pekan depan, Tim HPN Pusat harus terjun langsung ke lapangan untuk mempersiapkan teknis acara. Koordinasi intensif dengan PWI Kalsel dan Pemprov Kalsel sangat penting mengingat waktu yang tersisa hanya sekitar satu bulan,” ujar Hendry saat memimpin rapat Panpel HPN 2025 di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua PWI Kalsel H. Zainal Hilmie, Sekretaris PWI Kalsel Toto Fachrudin, dan Kepala Dinas Kominfo Kalsel Muhamad Muslim. Ketua Panpel HPN 2025, Raja Pane, memimpin rapat yang membahas persiapan akhir menuju perhelatan akbar tahunan insan pers ini.

Dalam rapat, Ketua PWI Kalsel Zainal Hilmie melaporkan hasil audiensinya dengan Gubernur Kalsel Muhidin sehari sebelumnya. Menurut Hilmie, Gubernur memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan HPN 2025 dan berkomitmen menyelesaikan seluruh rangkaian acara.

“Gubernur Kalsel sangat mendukung dan berharap HPN 2025 bisa membawa dampak positif bagi daerah, terutama untuk sektor pertanian, UMKM, dan iklim pers yang sehat di Kalsel,” ungkap Zainal Hilmie. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kadis Kominfo Kalsel Muhamad Muslim, yang menambahkan bahwa gubernur menginginkan HPN 2025 turut memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalsel.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menyambut baik komitmen Pemprov Kalsel. Ia optimis HPN 2025 akan berjalan sukses, bahkan berharap kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan Wakil

Presiden Gibran Rakabuming Raka pada puncak acara.

“Saya merasa optimis dengan persiapan ini. Teruslah bekerja keras, koordinasikan semua hal dengan baik, dan jangan lupa berdoa. Semoga Presiden dan Wakil Presiden bisa hadir di HPN 2025,” ujar Hendry.

Panpel HPN 2025 telah menyusun berbagai kegiatan unggulan, di antaranya penganugerahan Adinegoro, pameran pers nasional, seminar pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), Rakernas Siwo, dan konvensi media. Selain itu, akan digelar seminar bertajuk Prabowonomics, aksi wartawan menanam pohon di atas lahan lima hektare, hingga gerakan makan bergizi gratis bersama Presiden dan Wapres.

Ketua Panpel HPN 2025, Raja Pane, menegaskan bahwa tim akan turun langsung ke Banjarmasin untuk memastikan kesiapan lapangan dan menyelaraskan program dengan panitia lokal. Salah satu fokus utama adalah persiapan 15 panggung yang akan memeriahkan acara puncak, pelantikan kepala daerah se-Kalsel, serta pameran UMKM.

“Kita ingin semua kegiatan berjalan lancar dan maksimal. Oleh karena itu, seluruh tim akan bekerja sama erat dengan panitia lokal untuk menyesuaikan program dengan kondisi di lapangan,” ujar Raja Pane.

Acara puncak HPN 2025 ditargetkan berlangsung pada 9 Februari 2025. Meski demikian, tanggal tersebut masih tentatif karena menyesuaikan dengan agenda nasional.

Raja Pane berharap HPN 2025 menjadi ajang berkumpulnya insan pers dari seluruh Indonesia, sekaligus mempererat silaturahmi dan meningkatkan profesionalisme dunia pers tanah air.

“Kami optimis, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, HPN 2025 di Banjarmasin akan menjadi momentum bersejarah bagi dunia pers Indonesia,” pungkasnya. *

BPS NTT: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT Tahun 2024 Mencapai 69,14



Kupang, nwartapedia.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengumumkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT pada tahun 2024 mencapai angka 69,14. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,74 poin atau 1,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 68,40.

Kepala BPS NTT, Matamira B. Kale, S.Si, M.Si, menyampaikan bahwa kenaikan ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan manusia di provinsi tersebut.

“IPM merupakan indikator penting yang mengukur capaian pembangunan manusia dari tiga dimensi utama, yakni umur

panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak,” ujar Matamira dalam konferensi pers, Kamis (2/1/2025).

Pada dimensi kesehatan, harapan hidup di NTT pada tahun 2024 mencapai 71,83 tahun, meningkat 0,26 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Data ini diperoleh berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (SP2020-LF).

Sementara itu, pada dimensi pengetahuan, terdapat peningkatan pada dua indikator utama yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat dari 13,22 tahun menjadi 13,23 tahun, naik 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas mengalami peningkatan sebesar 0,20 tahun, dari 7,82 tahun pada 2023 menjadi 8,02 tahun di tahun 2024.

“Kenaikan indikator pendidikan ini mengindikasikan bahwa penduduk NTT memiliki akses pendidikan yang semakin baik dan terus mengalami perbaikan,” jelas Matamira.

Data mengenai HLS dan RLS diambil dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024.

Pada dimensi standar hidup layak, BPS mencatat adanya peningkatan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun sebesar Rp286 ribu atau 3,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat yang turut mendorong peningkatan kualitas hidup penduduk di NTT.

“Peningkatan ini merupakan sinyal positif bagi perekonomian daerah dan kualitas hidup masyarakat. Sumber data pengeluaran riil ini berasal dari hasil Susenas Maret 2024,” tambah Matamira.

Harapan Peningkatan Berkelanjutan

Matamira B. Kale menegaskan bahwa meskipun IPM NTT terus menunjukkan peningkatan, tantangan pembangunan manusia di

wilayah tersebut masih memerlukan perhatian serius. Pemerintah diharapkan terus memperkuat program-program di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat guna mencapai target pembangunan berkelanjutan.

“Kami optimis, dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, IPM NTT akan terus meningkat di masa mendatang,” tutupnya.

Peningkatan IPM NTT ini menjadi pencapaian penting yang diharapkan dapat mendorong pembangunan sosial dan ekonomi di provinsi tersebut serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (MI)

Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Pj. Gubernur NTT: Hanya Berlaku untuk Barang dan Jasa Mewah



Tenggara Timur (NTT), Dr. Andriko Noto Susanto, memastikan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya diterapkan untuk barang dan jasa mewah. Kebijakan ini, tegas Andriko, tidak akan memengaruhi kebutuhan pokok masyarakat.

“Kebijakan ini mengikuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah, bukan untuk kebutuhan pokok yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat,” ujar Andriko dalam keterangannya pada Kamis (2/1/2025).

Barang mewah yang dimaksud mencakup hunian dengan harga di atas Rp30 miliar, seperti apartemen eksklusif, kondominium, dan town house. Selain itu, tarif PPN ini juga berlaku untuk barang tertentu seperti pesawat pribadi, kapal pesiar, senjata api, serta peluru.

Sebaliknya, kebutuhan dasar seperti beras, daging, sayuran, ikan, susu, jasa pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum tetap dikenakan PPN 0 persen. “Arahan Presiden jelas. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi masyarakat kecil dan menjaga daya beli mereka,” tegasnya.

Kebijakan tersebut diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (31/12/2024). Presiden menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Langkah ini diambil untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Barang mewah dikenakan tarif lebih tinggi agar tidak membebani masyarakat kecil,” ujar Presiden Prabowo.

Sebagai bentuk komitmen melindungi masyarakat, pemerintah juga menyediakan paket stimulus senilai Rp38,6 triliun. Stimulus tersebut mencakup bantuan beras 10 kilogram per bulan untuk 16 juta penerima, diskon 50 persen tarif listrik bagi pelanggan dengan daya maksimal 2.200 volt, insentif PPh Pasal 21 bagi

pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan, serta pembebasan pajak bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

“Komitmen pemerintah adalah berpihak kepada rakyat kecil, melindungi daya beli mereka, dan mendorong pemerataan ekonomi,” ujar Presiden Prabowo.

Menutup keterangannya, Pj. Gubernur Andriko berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak berdasar.

“Kenaikan PPN ini tidak akan berdampak pada kebutuhan pokok. Mari kita fokus membangun ekonomi daerah sesuai arahan Presiden,” katanya.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. ***